

**LAMPIRAN IV
PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kita bersama-sama dapat melaksanakan dan mengakhiri segenap program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2023 dengan baik, selanjutnya dapat melaporkan hasilnya sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Hal ini tidak bisa lepas dari aspek perencanaan kerja yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan hingga pelaporan sesuai akuntabilitas dan transparansi. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang sebagian besar kewenangannya melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan melalui Pemerintah Daerah.

RENJA SATPOL PP Tahun 2024 ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan SKPD yang dicapai di tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak tahun 2018, dan dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kekurangan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran setiap tahunnya. Kami berharap RENJA ini juga dapat bermanfaat sebagai bentuk referensi dalam menentukan kebijakan di bidang kebencanaan di akhir tahun penyusunan RENSTRA SATPOL PP mendatang, demi mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kami menyadari bahwa RENJA ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dan peningkatan tugas-tugas kami ke depan, serta perencanaan program tahun berikutnya.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melanjutkan tugas-tugas kita, demi mewujudkan KABUPATEN KARANGANYAR YANG TENTERAM DAN TERTIB.
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Karanganyar, Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i		
DAFTAR ISI	ii		
DAFTAR TABEL	iii		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	7
	1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10	
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3	Isu-isu Pening Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40	
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
	3.3	Program dan Kegiatan	43
	3.4	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	60
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61	
BAB V	PENUTUP	70	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	22
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	27
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar	46
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Darah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona*

- Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan; Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Karanganyar-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);

31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya RENJA ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Tujuan Internal

- 1) Terpenuhinya ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Tersedianya dokumen acuan bagi SATPOL PP dalam merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya, dengan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Karanganyar.
- 3) Terjabarnya gambaran umum, program-program dan kegiatan-kegiatan SATPOL PP dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi SATPOL PP.
- 4) Terlaksananya seluruh jajaran aparatur di lingkungan SATPOL PP dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
- 5) Tersedianya alat pengukuran kinerja aparatur di lingkungan SATPOL PP dalam melaksanakan program dan kegiatan.

b. Tujuan Eksternal

- 1) Tersedianya masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Daerah dan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Terciptanya sinergi program-program dan kegiatan-kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, baik antar OPD,

Instansi/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

- 3) Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran dalam rangka program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daaerah	24
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Prangkat Daerah	40
	3.3 Program dan Kegiatan	43
	3.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	60

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V	PENUTUP	70

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2023 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang meliputi :

1. Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan;
2. Presentase tertanganinya kasus pelanggaran perda.

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar melaksanakan 3 Program dengan 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (6 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan);
2. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum (2 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan);
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan).

Indikator kinerja Tahun 2022 yang ada pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yaitu Presentase Realisasi Pencapaian Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dari target 100% realisasi sebesar 100%.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
 Hasil Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Renstra 2018-2023
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase peraturan yang ditegakkan	%	36,5	35	95,8	37	37
Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	%	48,3	52,6	108	48,8	48,8
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	75	70,70	94,2	76	76

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun lalu (2022) dan tahun berjalan (2023), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut.

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran								
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD								
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP	2 Dokumen	-	3 Dokumen	12 Bulan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	83,32 %
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	80,04 %	12 Bulan	7 Bulan	38,88 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	90,54 %	12 Bulan	12 Bulan	88,97 %	12 Bulan	7 Bulan	60,64 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Kelengkapannya	180 Stel	99,67 %	130 Stel	600 Stel	99,41 %	296 Stel	296 Stel	79,67 %
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Bintek/ Pelatihan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-
		Jumlah peserta yang mengikuti diklat Satpol PP	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	-	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor								
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	89,79 %	1 Paket	1 Paket	78,49 %	1 Paket	1 Paket	27,57 %
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	2 Item	-	3 Item	3 Item	-	-	-	87,70 %
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 Item	99,47 %	38 Item	38 Item	99,95 %	38 Item	38 Item	50,62 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 Item	99,25 %	9 Item	8 Item	99,91 %	9 Item	9 Item	50,25 %
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Item	86,55 %	3 Item	1 Item	80,13 %	3 Item	3 Item	36,83 %
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi Keluar yang terlaksana	12 Bulan	99,62 %	12 Bulan	12 Bulan	98,52 %	12 Bulan	12 Bulan	55,11 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat selama satu tahun	700 Surat	99,77 %	700 Surat	700 Surat	99,92 %	700 Surat	330 Surat	49,60 %
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Langganan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 Bulan	60,75 %	12 Bulan	12 Bulan	84,65 %	12 Bulan	7 Bulan	53,16 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terbayar								
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan dan bahan Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayar	12 Bulan	95,90 %	12 Bulan	12 Bulan	99,71 %	12 Bulan	7 Bulan	50,08 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	60,96 %
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin	30 Unit	92,96 %	30 Unit	30 Unit	92,94 %	30 Unit	30 Unit	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja dibayar	12 Bulan	99,23 %	12 Bulan	12 Bulan	99,60 %	12 Bulan	7 Bulan	30,03 %
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	27,06 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan Bangunan Gedung Kantor dilakukan	12 Bulan	98,32 %	12 Bulan	12 Bulan	99,54 %	12 Bulan	7 Bulan	-
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	80,27 %	12 Bulan	12 Bulan	99,68 %	12 Bulan	7 Bulan	58,40 %
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada								
		Rasio Linmas terhadap Jumlah Penduduk								
		Presentase Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Akibat dari Penegakkan Perda								
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat								
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah kecamatan yang terbebas dari praktek prostiitusi dan terselenggaranya ketentraman	17 Kecamatan	80,25 %	17 Kecamatan	17 Kecamatan	96,81 %	17 Kecamatan	17 Kecamatan	51,30 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	ketertiban								
		Jumlah bulan terciptanya kegiatan yang aman, tertib, dan lancer	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Kecamatan yang terjangkau patrol wilayah	17 Kecamatan		17 Kecamatan	17 Kecamatan		17 Kecamatan	17 Kecamatan	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kantong PKL dan reklame liar yang dapat ditertibkan	5 Titik Wilayah	99,90 %	5 Titik Wilayah	5 Titik Wilayah	-	5 Titik Wilayah	5 Titik Wilayah	55,57 %
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Keg. Satpol (Bhakti Sosial, Gelar pasukan, Jambore Tk Prov, Gelar Pasukan HUT Kab. Karanganyar)	4 Event	86,09 %	4 Event	2 Event	96,33 %	4 Event	1 Event	76,17 %
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan pengarahan anggota Satlinmas	12 Bulan	98,80 %	12 Bulan	12 Bulan	99,17 %	12 Bulan	12 Bulan	83,90 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP	2 Pelatihan	68,13 % -	2 Pelatihan	2 Pelatihan	95,85 % -	2 Pelatihan	2 Pelatihan	95,34 %
		Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya anggota Satpol PP	200 Peserta		200 Peserta	210 Peserta		200 Peserta	200 Peserta	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kader Siaga Trantib (KST) yang terbina	-	-	1593 Kader	1593 Kader	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pilkada/ Pilkades serentak dengan aman	-		1 Kegiatan	1 Kegiatan		-	-	-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Presentase Penegakan Perda								
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 Buah	95,87 %	13 Buah	13 Buah	74,43 %	40 Buah	40 Buah	17,30 %
		Jumlah keikutsertaan peserta per kegiatan	550 peserta		400	400		550	-	

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Peserta	Peserta		peserta		
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kegiatan Operasi Penegakan Perda	60 Kegiatan	75,14 %	60 Kegiatan	60 Kegiatan	93,56 %	60 Kegiatan	60 Kegiatan	36,12 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Presentase Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)								
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah anggota PPNS yang terorganisasi	15 Orang	-	15 Orang	15 Orang	-	15 Orang	15 Orang	-
1.05.04	Program Penanggulangan Kebakaran	Rasio WMK terhadap Luas Wilayah								
		Prosentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran								
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tertanganinya Kasus Pemadaman Kebakaran								
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pencegahan Kebakaran	12 Bulan	99,81 %	12 Bulan	12 Bulan	99,38 %	12 Bulan	12 Bulan	52,76 %

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah kebutuhan akan alat yang mendukung sarana operasional peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	98,60 %
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan atau pembinaan aparatur pemadam kebakaran guna peningkatan skill	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,95 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Kecamatan yang dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kecamatan pelaksanaan pendataan	17 Kecamatan	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	97,90 %
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran								

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah kecamatan yang terbentuk dan pembinaan terhadap satlakar/ balakar	1 Kegiatan	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	-
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Operasional Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	3 Bulan	-	-	-	-
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n-2)	
1	2	3	4	5	6	9	13
1	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100%	100%	100%	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		100%	100%	100%	

3	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%
4	Presentase Perda Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%
5	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	100%	100%	100%
6	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran		15 Menit	15 Menit	15 Menit	13,61 Menit

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
Secara umum program dimaksud tidak ada masalah semua berjalan sesuai dengan program. Tetapi ada beberapa kendala diantaranya :
 - a. Belum tersedianya mesin pembangkit listrik portable (genset) sehingga apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN maka aktivitas pelayanan yang membutuhkan daya listrik akan terhenti;
 - b. Masih kurangnya peralatan kantor guna mendukung kegiatan pelayanan kepegawaian seperti PC, laptop, printer, dsb;
 - c. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana mobilitas karena banyaknya kendaraan yang sudah mulai rusak;
 - d. Masih minimnya kesempatan dan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil yang belum dapat tercapai secara ideal;
 - f. Belum dimilikinya dokumen rencana teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. Upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masih disikapi dengan cara responsif dan situasional;
 - h. Minimnya media koordinasi dan komunikasi antar SATPOL PP Kabupaten/Kota lain maupun OPD terkait, serta upaya sosialisasi peraturan-peraturan kepada OPD maupun kepada segenap lapisan masyarakat.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Kualitas disiplin aparatur yang masih perlu untuk ditingkatkan;
 - b. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana pelayanan operasional dan lapangan yang memadai;
 - c. Belum maksimalnya koordinasi dan kepedulian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas;
 - d. Karena tahun 2024 merupakan tahun politik, perlu diwaspadai adanya peningkatan pelanggaran peraturan daerah;

- e. Keberadaan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan personel SATPOL PP di wilayah;
 - f. Belum terdapat peraturan yang mengatur garis koordinasi dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan;
 - g. *Overlapping* tugas pokok yang mungkin terjadi dengan Instansi penegak hukum;
 - h. Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa yang dikomandani oleh Kepala Desa/Lurah, belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan teknis, atau peningkatan sumber daya;
 - i. Kondisi perekonomian yang tidak stabil memicu meningkatnya PKL, PGOT sehingga diperlukan penanganan/penertiban yang melibat berbagai pihak terkait secara menyeluruh;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait;
 - c. Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - d. Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai;
 - e. Perlunya pengembangan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung Misi kelima dari Kepala Daerah yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda

dan Olah raga, diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN.

Sedangkan isu penting yang harus ditindaklanjuti saat ini dalam program program di Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

OPD : SATPOL PP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	161.840.800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	15.656.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP	2 Dokumen	33.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP	2 Dokumen	7.727.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	128.840.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	7.929.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	7.385.107.950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	4.949.213.725	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	7.385.107.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	4.949.213.725	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	231.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	310 Paket	231.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	310 Paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	450.725.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	274.598.922	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.308.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	8.025.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	40.293.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	47.744.422	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	24.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	13.612.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8.107.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.865.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	366.025.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.043.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	302.564.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	229.643.478
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.763.578
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201.344.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.879.900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	907.688.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	402.340.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	402.688.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	367.276.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.444.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	20.620.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Tertanganinya Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	7.631.500.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Tertanganinya Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	6.307.255.700	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	6.000.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	94.473.000	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	120 Kasus	200.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	261.977.700	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	2 Dokumen	198.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	97.360.000	

		Kabupaten/ Kota									
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	368.500.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	-		
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	330.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 Dokumen	-		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	115.000.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	5.823.445.000		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	1 Unit	410.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	120 Laporan	30.000.000		

								Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	1 Unit	-		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Meningkatnya Penegakan Perda	100%	1.226.500.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Meningkatnya Penegakan Perda	100%	724.450.000		
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	500.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	50.000.000		
		Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 Buah				Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 Buah			
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap	3 Laporan	26.500.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	12 Laporan	674.450.000		

		kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota					Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani Sesuai SOP			
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	700.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	3 Laporan	-	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Presentase Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100%	55.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Presentase Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100%	5.000.000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	55.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	5.000.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Tertanganinya Kasus Pemadaman Kebakaran	100%	1.200.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Tertanganinya Kasus Pemadaman Kebakaran	100%	1.064.805.200
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	1.000.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	998.440.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6 Laporan	15.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6 Laporan	-
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	30.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	60 Orang	27.340.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	60 Orang	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	39.025.200
Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen	30.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen	-
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Presentase dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	25.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Presentase Kecamatan yang dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	10.000.000

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	25.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	10.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	35.093.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	60.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	-
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKLL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan	20.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKLL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan	35.093.000

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	105.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	-	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar	6 Dokumen	55.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar	6 Dokumen	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	25 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	25 Unit	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program, kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

OPD: Satpol PP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
			Kinerja	Volume	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditetapkan visi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sebagai upaya dalam pencapaian tersebut, maka misi pembangunan nasional dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan Tata Pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara

terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Daerah dalam kegiatan SATPOL PP. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, “menantang” namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Satpol PP Kabupaten Karanganyar memiliki sasaran sesuai dengan Renstra Satpol PP:

1. Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan;
2. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Renstra
					2024
Meningkatkan Daya Saing Daerah		Indeks reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	85
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	88
	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	Upaya Penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam waktu 1 tahun	%	37,5
		Respon time Penanganan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	%	48,8

3.3. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Sejalan dengan misi Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yaitu Rp. 14.081.056.825,-. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 4) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - 5) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
 - 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
 - 1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KARANGANYAR

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF 2024 (Rp)	PRAKIRAAN MAJU 2025 (Rp)		
									CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN				HASIL KEGIATAN	
									TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.018.056.825	21.735.093.445			
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kapasitas pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, berdaya	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		5.871.452.925	10.379.793.445			

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	saing dan akuntabel					Presentase tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	15.656.300	175.000.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Satpol PP			Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP	2 Dokumen			7.727.200	40.000.000
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kantor Satpol PP			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			7.929.100	135.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	4.949.213.725	8.123.618.745
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Satpol PP			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan			4.949.213.725	8.123.618.745
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	254.100.000
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kantor Satpol PP			Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Kelengkapannya	315 Stel			-	254.100.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	274.598.922	495.797.500
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Satpol PP			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket			6.308.400	13.310.000	

1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Satpol PP			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			150.000.000	221.478.400
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Satpol PP			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			61.879.900	72.842.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	402.340.500	998.456.800
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Satpol PP			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			-	110.000.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kantor Satpol PP			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	30 Unit			367.276.500	442.956.800

1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kantor Satpol PP			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			14.444.000	66.000.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor Satpol PP			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			-	242.000.000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor Satpol PP			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit			-	82.500.000
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor Satpol PP			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit			20.620.000	55.000.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100%					7.036.705.700	3.204.300.000
								Rasio Linmas terhadap Jumlah Penduduk	0,65%						

1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Kantor Satpol PP			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang			97.360.000	363.000.000
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Kab. Karanganyar			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen			-	126.500.000
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat			Kantor Satpol PP			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	1 Dokumen			-	11.000.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab. Karanganyar			Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1 Laporan			5.823.445.000	6.600.000.000

1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Kab Karanganyar		Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	120 Laporan			30.000.000	220.000.000
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kantor Satpol PP		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit			-	451.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						Meningkatnya Penegakan Perda	100%	724.450.000	1.349.150.000
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Kantor Satpol PP		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	1 Laporan			50.000.000	550.000.000
									Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 Buah				

1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota					Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan			674.450.000	770.000.000	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	80 Laporan			-	29.150.000	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										100%	5.000.000	60.500.000
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					Kantor Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan			5.000.000	60.500.000	

1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Presenta se warga negara yang memper oleh layanan penyela matan dan evakuasi korban kebakara n	100%						1.109.898.200	1.551.000.000
								Rasio WMK terhadap Luas Wilayah	32%							
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							Presentase Tertanganin ya Kasus Pemadaman Kebakaran	100%	1.064.805.200	1.320.000.000	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya		1 Dokumen				998.440.000	1.100.000.000	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		12 Bulan			-		16.500.000	

1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Kab. Karanganyar		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/evakuasi Saat penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Bulan			-	33.000.000
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Kab. Karanganyar		Jumlah kegiatan pelatihan atau pembinaan aparatur pemadam kebakaran guna peningkatan skill	60 Orang			27.340.000	82.500.000
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Kantor Satpol PP		Jumlah kebutuhan akan alat yang mendukung sarana operasional peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	25 Unit			39.025.200	55.000.000
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kantor Satpol PP		Jumlah kegiatan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah	12 Bulan			-	33.000.000

1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						Presentase Kecamatan yang dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	10.000.000	27.500.000
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Kab. Karanganyar			Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/ Gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki system proteksi kebakaran	4 Dokumen		10.000.000	27.500.000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Presentase Meningkatkan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	35.093.000	360.000.000
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kab. Karanganyar			Jumlah warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 Orang		-	66.000.000
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kab. Karanganyar			Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	5 Desa/ Kelurahan		35.093.000	22.000.000

1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						Presentase Terselenggara ranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	100%	-	115.000.000
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Kantor Satpol PP		Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar	6 Dokumen			-	60.500.000
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	25 Unit			-	55.000.000

1	05	04	2.05	0006	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi						Jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	1 Laporan			-	80.000.000
---	----	----	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	------------

3.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
2. Masyarakat kurang memahami keberadaan Satpol PP terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya;
3. Bertambahnya jumlah penduduk yang berarti menjadi bertambahnya kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
4. Minimnya alokasi dana untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan juga menjadi kendala bagi Satpol PP;
5. Kebebasan dalam berpendapat yang sering di salah artikan serta gaya hidup yang individualisme yang dapat memicu gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
6. Pergeseran ke zaman era globalisasi yang disalah gunakan

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karanganyar meliputi :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap politik;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pendekatan dengan Masyarakat dengan cara sosialisasi peran tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP;
4. Menambah sumber daya manusia dalam peningkatan kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
5. Peningkatan Kerjasama antar instansi baik pemerintah dan non pemerintah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar selama 3 tahun dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dimana Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 untuk pendanaannya seperti pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN ATAU/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								TARGET	Rp
				Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi								
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD				%	88	14.018.056.825,-
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%	%	100	5.871.452.925,-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%	100	15.656.300,-

						Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.727.200,-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	7.929.100,-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran OPD	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.949.213.725,-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	52	4.949.213.725,-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	274.598.922,-
				Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.308.400,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.025.000,-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan	Jumlah Paket	Paket	38	47.744.422,-

					Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	13.612.500,-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	5.865.000,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	193.043.600,-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	229.643.478,-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	17.763.578,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000,-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	61.879.900,-

						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	402.340.500,-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	367.276.500,-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	14.444.000,-
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	20.620.000,-
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli dalam sehari dibagi 3 dikali 100 %	%	100	7.036.705.700,-
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum		%	100	6.307.255.700,-
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Dokumen	2	94.473.000,-

				Tingkat Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	261.977.700,-
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	250	97.360.000,-
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	1	5.823.445.000,-
				Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman	Laporan	120	30.000.000,-

			Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Meningkatnya Penegakan Perda	Jumlah Laporan Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Peraturan	%	100	724.450.000,-
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	50.000.000,-
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Laporan	12	674.450.000,-
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas anggota PPNS	Jumlah Bulan terpenuhinya Pembinaan Terhadap Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri	%	100	5.000.000,-

				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sipil (PPNS) Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	12	5.000.000,-
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan	Jumlah warga masyarakat yang terdampak dibagi Jumlah seluruh masyarakat kabupaten, kali 100%	%	100	1.109.898.200,-
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Operasional Pemadam Kebakaran	%	100	1.064.805.200,-
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	998.440.000,-
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Orang	60	27.340.000,-

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kebakaran Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	25	39.025.200,-
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Bulan Terpenuhi Inspeksi Peralatan Proteksi		%	100	10.000.000,-
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki system proteksi kebakaran	Dokumen	4	10.000.000,-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah bulan terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	%	100	35.093.000,-
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	5	35.093.000,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan Masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, serta berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2022) sampai dengan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (2023). Disamping itu penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPERLITBANG	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan Masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, serta berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2022) sampai dengan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (2023). Disamping itu penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan Masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, serta berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2022) sampai dengan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (2023). Disamping itu penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

